

350/361 EKONOMI PEMBANGUNAN

LAPORAN PENELITIAN EVALUASI PROGRAM STUDI



EVALUASI PROGRAM ALIH KREDIT PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

Oleh :

Ir. Tri Kurniawati R, M.Si

Drs. Suhartono, M.Si

Ir. M. Kholis, M.Si

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN LANJUT

Judul Penelitian : **EVALUASI PROGRAM ALIH KREDIT
PROGRAM STUDI EKONOMI
PEMBANGUNAN**

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Ir. Tri Kurniawati R. M.Si
b. NIDN : 0013035902
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
e. Nomor HP : 08129974681
f. Alamat Surel (Email) : nuning@ut.ac.id

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : 1. Drs. Suhartono, M.Si
b. NIDN : 0023076301
c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
d. Nama Lengkap : 2. Ir. M. Kholis, M.Si
e. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
Biaya Penelitian : Rp 30.000.000,00

Tangerang Selatan, 26 Maret 2014

Mengetahui,
Dekan,

Ketua Peneliti,

Drs. Moh. Muzammil, M.M
NIP 19610917 198703 1 002

Ir. Tri Kurniawati R. M.Si
NIP 19590313 198603 2 001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D
NIP 19610212 198603 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB III METODE PENELITIAN	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
BAB V PENUTUP DAN SARAN	
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pedoman Alih Kredit	23
2. Jumlah Alih Kredit yang diterima	
3. SK Alih Kredit	24

RINGKASAN

Program Alih Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama / berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama.

Evaluasi program adalah proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan, kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan.

Model yang akan digunakan pada penelitian ini adalah mengacu pada model CIPP dan memfokuskan pada proses pelaksanaan alih kredit

Kata kunci: *alih kredit, evaluasi program, evaluasi kebijakan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem pendidikan kita. Diantaranya adalah: *pertama*, rendahnya kualitas atau mutu pendidikan. *Kedua*, adalah belum adanya pemerataan dalam memperoleh akses di bidang pendidikan. *Ketiga*, adalah tidak adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang *keempat* adalah belum adanya demokratisasi pendidikan. Peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan masih sangat terbatas. Khusus untuk Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka, persoalan yang dirasakan sangat penting berkaitan dengan jumlah peserta didik yang mengambil program studi ini. Hal itu disebabkan karena belum terbiasanya mahasiswa dengan proses belajar mandiri. Disamping itu juga adanya ketidaksesuaian antara ”*supply*” lulusan dengan kecilnya ”*demand*”. Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka untuk mengantisipasi hal itu adalah Kebijakan Sistem Alih Kredit. Sistem ini dilakukan dengan cara mengakui matakuliah yang telah ditempuh mahasiswa di perguruan tinggi asal dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dan membantu mahasiswa untuk menenpuh jenjang sarjana strata satu, sehingga dapat meningkatkan kualitas dirinya di lingkungan kerjanya dan meningkatkan kualitas pendidikan yang menunjang etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, sehingga ada kesesuaian antara mutu dan kemampuan yang dimiliki lulusan, dengan tuntutan dunia kerja. Pelaksanaan program alih kredit di Universitas berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 188/U/1998 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 304/DIKTI/Kep/1998 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan program alih kredit untuk Program Studi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan panduan yang ada?
2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan program alih kredit untuk Program Studi Ekonomi Pembangunan ?
3. Apakah pelaksanaan program alih kredit mendorong terjadinya perubahan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program alih kredit untuk Program Studi Ekonomi Pembangunan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program alih kredit untuk Program Studi Ekonomi Pembangunan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan program alih kredit apakah dapat mendorong terjadinya perubahan.

1.4. Manfaat Penelitian

Pendidikan adalah kegiatan yang kompleks yang terjadi dalam sebuah masyarakat yang lebih besar dan selalu berubah terdiri dari sistem sosial, ekonomi, dan politik saling bergantung. Dalam konteks ini, evaluasi penelitian dan analisis kebijakan membawa perspektif rasional dan empiris untuk arena keputusan pendidikan dan pembuatan kebijakan. Hasil evaluasi dan studi kebijakan memiliki manfaat langsung bagi perbaikan pendidikan.

Beberapa manfaat yang paling dirasakan bagi dunia pendidikan adalah sebagai berikut:

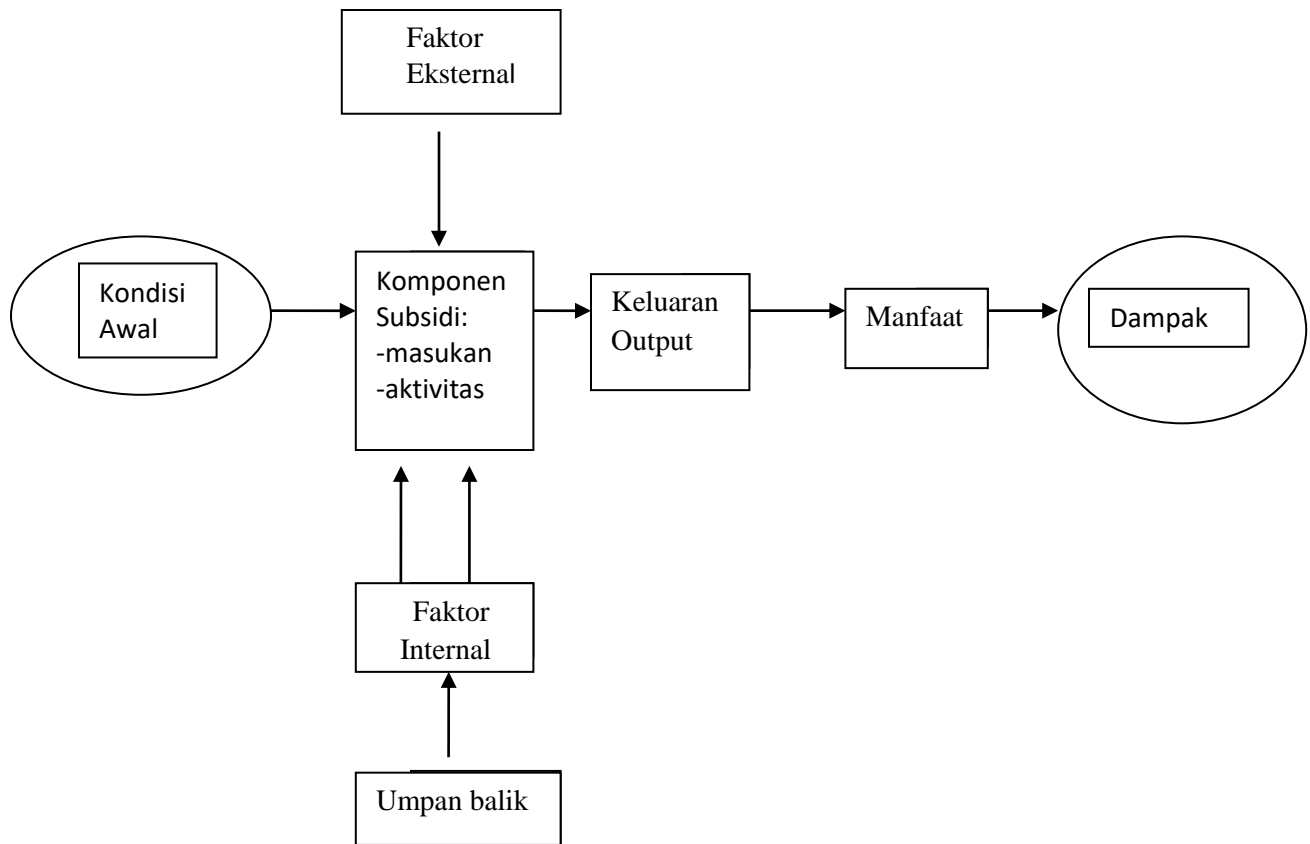
1. Memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan pada basis sistematis. Bukti apa yang bekerja adalah penting dalam membenaran program. Bukti apa yang tidak bekerja memungkinkan para pembuat keputusan dan orang-orang dengan pengaruh atas kebijakan merombak alternatif dianggap sebagai solusi.

2. Menunjukkan tanggung jawab profesional dengan menilai kualitas program alih kredit.
3. Mengurangi ketidakpastian tentang program alih kredit
4. Memenuhi persyaratan lembaga eksternal untuk laporan yang melegitimasi keputusan dan meningkatkan citra Universitas Terbuka.
5. Memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah bagi *policy maker* atau *stake holders* untuk memungkinkan mereka untuk lebih mengantisipasi isu-isu program dan kebijakan.

1.5. Kerangka Berfikir

Rancangan penelitian ini adalah evaluatif, yang menggunakan pendekatan *System & Model for Delineating Program Elements in The Evaluation Process (Shortell & Richardson, 1978)*, yang meliputi: kondisi awal, masukan (*inputs*), proses (*processes*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*) dan dampak (*impacts*). Teknik penilaian dilakukan secara *Rapid Appraisal Methods*.

Kerangka penelitian yang digunakan dapat diilustrasikan seperti pada gambar 1 berikut ini



Gambar 1: Kerangka Pikir Studi

Kriteria evaluasi sumatif didasarkan pada perbandingan outputs dengan inputs. Sedangkan kriteria evaluasi formatif didasarkan pada tingkat korespondensi outputs dan outcomes yang diperoleh atau impacts yang terjadi. Evaluasi tujuan dimaksudkan untuk membandingkan pencapaian tujuan dengan tujuan yang diharapkan dan tidak .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Program Alih Kredit

Program alih kredit dari suatu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya tidak hanya berlaku di Universitas Terbuka. Sudah banyak perguruan tinggi lain yang menerapkan kebijakan ini. Salah satunya perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Malang menyatakan bahwa:

1. Program Alih Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama / berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama;
2. Program Alih Kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh PT-Mitra yang sebetulnya juga diberikan di PT-Asal; oleh sebab itu jumlah sks PT mitra yang dapat diakui oleh PT asal adalah maksimum 50% dari total beban sks;
3. Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil di PT-Mitra dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi Keterangan Tambahan Ijazah (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan keluaran (*outcomes*) dari program kerja sama tersebut.

Dalam Pasal 46 dinyatakan pula bahwa

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, dari dalam maupun luar negeri dalam program studi yang sama.
- (2) Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan setiap awal semester.
- (3) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di jurusan/program studi asal, surat keterangan Dekan/Direktur asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya dikabulkan wajib memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di UMM melalui proses ekivalensi.
- (5) Jumlah SKS ekivalensi dan konversi mata kuliah ditetapkan ketua jurusan/program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang pindah ditetapkan dengan surat keputusan

Dalam Pasal 47 tentang Program Alih Jenjang dinyatakan pula:

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang dapat menerima lulusan program Diploma III dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi yang sama pada program sarjana dengan pertimbangan daya tampung dan kesesuaian kurikulum.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan waktu studi selama 7 tahun dikurangi masa studi di perguruan tinggi asal.
- (3) Pengakuan terhadap matakuliah yang telah ditempuh ditetapkan oleh jurusan/program studi.
- (4) Waktu pendaftaran alih jenjang selambat-lambatnya 3 minggu awal kuliah semester ganjil.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang alih jenjang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Namun ada ganjalan lain dalam masalah alih kredit ini, yaitu jika diberlakukan alih kredit dari lembaga kursus ke program sarjana strata satu di perguruan tinggi.

Berdasarkan surat dari Ditjen Dikti, April lalu bernomor 982/D/T/99 yang diterbitkan 12 April 1999, ditandatangani Dirjen Dikti, Prof Dr Ir Bambang Soehendro. Tembusan surat itu juga disampaikan ke Direktur Binsarak Ditjen Dikti dan Direktur Dikmas Ditjen Diklusepora. Dalam surat tersebut dinyatakan, ada kemungkinan kegiatan kursus diberi kesetaraan SKS untuk pemenuhan SKS program S1 di PT jika memenuhi beberapa hal. *Pertama*, alih kredit bukan untuk matakuliah dalam kurikulum nasional. *Kedua*, alih kredit kemungkinan besar ada dalam mata kuliah dasar umum. *Ketiga*, program dilakukan terjadwal dan ada evaluasi hasil belajar. *Keempat*, alih kredit mungkin dilakukan berdasarkan evaluasi PT yang mengalihkan kredit; termasuk pengajar, isi, dan sasaran kursus, sesuai dan mempunyai kesetaraan dengan matakuliah yang ada di PT. Dalam surat tersebut dicontohkan, kegiatan kursus yang dapat dinilai SKS antara lain bahasa Inggris dengan skor TOEFL sebagai evaluasi. Begitu juga dengan penggunaan komputer, mengetik, atau kegiatan keterampilan yang dapat mendukung kinerja sarjana lulusan PT.

2.2. Prosedur Alih Kredit di Universitas Terbuka

Di lingkungan Universitas Terbuka, alih kredit didefinisikan sebagai pengakuan pengalaman belajar dan kelulusan matakuliah yang telah diperoleh mahasiswa dari suatu perguruan tinggi lain atau dari program studi lain yang ada di Universitas Terbuka. Ketentuan alih kredit di Universitas Terbuka mengacu pada peraturan yang berlaku di Universitas Terbuka dan tercermin dalam aplikasi sistem alih kredit Universitas Terbuka.

Prosedur alih kredit dimulai dengan penerimaan berkas alih kredit, penilaian dan pengakuan matakuliah yang dialihkreditkan, entry data sampai terbitnya SK Dekan. Untuk prosedur alih kredit dapat dilihat pada Lampiran 1.

Alih kredit yang berlaku di Universitas Terbuka mencakup:

- a. Dari Perguruan Tinggi lain ke Universitas Terbuka:
 - Dari alumni Perguruan Tinggi lain
 - Mahasiswa pindahan
- b. Dari UT ke UT
 - Dari alumni Program Studi lain
 - Mahasiswa pindahan Program Studi

Ketentuan umum yang memuat hal-hal yang dapat dialihkreditkan antara lain berupa:

- Kelulusan matakuliah dari dari perguruan tinggi lain atau dari program studi lain di UT
- Penilaian hasil belajar melalui pengalaman
- Hasil kesepakatan kerjasama

Adapun pengajuan alih kredit dengan menggunakan formulir yang telah tersedia dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dari UT ke UT
 - Daftar matakuliah yang diajukan untuk dilaihkreditkan
 - Fotocopy daftar nilai ujian, transkrip program studi lama
 - Foto copy kartu mahasiswa
 - Tanda bukti setoran UT dari BRI lembar ke -2 (warnabiru)
 - Surat keterangan mengajar (khusus FKIP)
- b. Dari Perguruan Tinggi lain ke Universitas Terbuka:
 - Daftar matakuliah yang diajukan untuk dilaihkreditkan
 - Formulir deskripsi mata kuliah yang telah diisi serta ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi asal
 - Fotocopy ijazah/surat keterangan pernah kuliah dari perguruan tinggi asal yang telah dilegalisasi

- Fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisasi
- Daftar Nilai Hasil Ujian Negara (bila berasal dari perguruan tinggi swasta) yang telah dilegalisasi
- Surat keterangan konversi nilai yang sudah diubah ke sistem SKS dan nilai berupa huruf/abjad (bila nilai masih dalam sistem paket/angka)
- Tanda bukti setoran UT dari BRI lembar ke -2 (warnabiru)
- Foto copy kartu mahasiswa
- Surat keterangan mengajar (khusus FKIP)

2.3. Konsep Evaluasi

2.3.1. Pengertian Penelitian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yg telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya (Mulyono 2009). Sedangkan menurut Rika Dwi K. (2009) Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan.

Viviane dan Gilbert de Lansheere (dalam Inggit Kurniawan, 2009) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Zulharman (2007) Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program.

Evaluasi program adalah proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan, kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak (Edison, 2009). Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 222) penelitian evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian evaluasi merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek (efektifitas suatu program) sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program.

2.3.2. Fungsi dan Tujuan Penelitian Evaluasi

Michael Scriven (dalam Arikunto, 2007: 222-223) mengemukakan bahwa secara garis besar fungsi penelitian evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yakni:

1. Evaluasi formatif difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu pendidikan masih berlangsung. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk “membentuk” (*to form*) dan memodifikasi program kegiatan. Jika pada pertengahan kegiatan sudah diketahui hal-hal apa yang negatif dan para pengambil keputusan sudah dapat menentukan sikap tentang kegiatan yang sedang berlangsung maka terjadinya pemborosan yang mungkin akan terjadi, dapat dicegah.
2. Evaluasi sumatif dilangsungkan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana sesuatu program mempunyai nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Penilaian sumatif bermanfaat datanya bagi para pendidik yang akan mengadopsi program yang dievaluasi berkenaan dengan hasil, program atau prosedur.

Sedangkan menurut Tayipnapi (1989: 3): Evaluasi dapat mempunyai dua kegunaan, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif, evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk, dsb). Fungsi sumatif, evaluasi digunakan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari pihak yang terlibat.

Pada prinsipnya tujuan evaluasi program harus dirumuskan dengan titik tolak tujuan program yang akan dievaluasi (Dwiyogo, 2006: 50). Ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada tiap-tiap komponen dari program.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian evaluasi mempunyai dua fungsi yaitu 1) Fungsi formatif, untuk pengumpulan data pada kegiatan yang sedang berjalan dan digunakan untuk perbaikan, pengembangan, dan modifikasi program. 2) Fungsi sumatif yang dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan. Digunakan untuk pertanggungjawaban program dan penentuan sejauh mana kemanfaatan program. Penelitian evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi komponen-komponen program dan program secara menyeluruh.

2.3.3. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah kegiatan menilai mencari terobosan baru untuk penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan, "Apa perbedaan yang dibuat?". Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. (Dunn:2000:36)

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan atau program. Secara umum istilah evaluasi dapat diartikan sebagai penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk melakukan analisa hasil sebuah kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam artian yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini dapat disebut bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau dapat diatasi. Deskripsi utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Pertanyaan yang terlontar tentang evaluasi bukanlah mengenai fakta (apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?). Tetapi berhubungan dengan nilai (Berapa nilainya?). Karenanya evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya, yaitu :

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik 'fakta' maupun 'nilai'. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan yang demikian harus didukung oleh bukti-bukti bahwa hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau, Tuntutan evaluasi, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, dibandingkan hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Dapat dianggap sebagai intrinsik ataupun ekstrinsik. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksika kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Evaluasi memainkan sejumlah peran utama dalam sebuah analisis kebijakan.
Pertama, bahwa evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan tertentu (contohnya; perbaikan sarana jalan) dan target tertentu (misalnya, 20 % pengurangan pengangguran).
Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis

kepentingan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kesesuaian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya kelompok masyarakat) maupun landasan kebijakan dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Evaluasi atau penilaian terhadap sebuah kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Proses Kebijakan yang terdiri dari beberapa tahapan.(Dunn:2000:608).

Sebuah kebijakan dimulai dari adanya isu atau masalah yang kemudian diagendakan untuk dicari pemecahannya. Kemudian dilakukan formulasi kebijakan dengan mencari beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut melalui metode *forecasting* (peramalan). Langkah selanjutnya adalah menetapkan atau memilih alternatif pemecahan yang dianggap paling baik.

Sebuah kebijakan harus diikuti oleh proses adanya tindakan (*policy implementation*) seperti gambar di atas. Dari tindakan tersebut akan memberikan hasil (*out put*) tertentu dan dampak tertentu sesuai kebijakan tersebut. Hasil atau *out put* beserta dampak yang ada akan menjadi *feed back* (umpan balik) bagi kebijakan lainnya atau menjadi perbaikan (evaluasi) bagi kebijakan sebelumnya. Dengan dilakukannya evaluasi (*policy assesment*), maka suatu program akan dapat dinilai dengan hasil yang dicapai dan dampak yang ditimbulkan, apakah sudah sesuai dengan harapan atautkah masih jauh dari tujuan dari kebijakan atau program. Oleh karena itu, studi evaluasi akan dapat menjawab bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan, apa kendalanya, apakah program dapat mencapai sasaran, variabel-variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan atau program.

Teori evaluasi kebijakan akan dapat mengetahui peran para aktor dalam pembuatan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan melalui beberapa proses. Pertama, proses pengkajian kebijakan. Dalam proses pengkajian harus memahami metode analisis yang bertujuan menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

2.4. Model-model Evaluasi

Terdapat beberapa beberapa model evaluasi sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program, yaitu:

a. Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang tujuannya untuk mengambil keputusan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan suatu program (Fuddin, 2007). Mbulu (1995: 62) model CIPP merupakan singkatan (akronim) dari *context evaluation, input evaluation, process evaluation, dan product evaluation* yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan kawan-kawannya pada tahun 1968 di Ohio State University dan berorientasi pada pengambilan keputusan. Ada beberapa bentuk evaluasi dalam konteks ini yaitu:

- *Context evaluation to serve planning decision.* Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program (Tayibnapis, 1989: 10-11). Evaluasi konteks meliputi penggambaran latar belakang program yang dievaluasi, memberikan perkiraan kebutuhan dan tujuan program, menentukan sasaran program dan menentukan sejauh mana tawaran ini cukup responsif terhadap kebutuhan yang sudah diidentifikasi (Edison, 2009). Mbulu (1994/1995: 62-63) evaluasi konteks meliputi:
 - a) analisis masalah/kebutuhan yang berhubungan dengan lingkungan. Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut telah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah: b) menggambarkan secara jelas dan terperinci tujuan program yang akan memperkecil kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Dengan singkat dapat dikemukakan bahwa evaluasi konteks adalah evaluasi terhadap kebutuhan-kebutuhan, tujuan pemenuhan kebutuhan serta karakteristik individu yang melaksanakan evaluasi.
- *Input evaluation, structuring decision.* Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya

- (Tayibnaxis, 1989: 11). Evaluasi ini digunakan dalam pelaksanaan program, diadakan penjadwalan dan prosedur pelaksanaannya (Mbulu, 1994/1995: 63). Edison (2009) evaluasi masukan dilaksanakan dengan tujuan dapat menilai relevansi rancangan program, strategi yang dipilih, prosedur, sumber baik yang berupa manusia (guru, siswa) atau mata pelajaran serta sarana prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Singkatnya masukan (input) merupakan model yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara agar penggunaan sumberdaya yang ada bisa mencapai tujuan serta secara esensial memberikan informasi tentang apakah perlu mencari bantuan dari pihak lain atau tidak. Aspek input juga membantu menentukan prosedur dan desain untuk mengimplementasikan program.
- *Process evaluation, to serve implementing decision.* Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasi keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki (Tayibnaxis, 1989; 11). Mbulu (1994/1995: 63) evaluasi proses dipergunakan untuk membantu memberikan dan menyediakan informasi balikan dalam rangka mengimplementasi keputusan, sampai sejauh mana rencana-rencana atau tindakan-tindakan yang hendak dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan prosedur dan penjadwalan yang ditetapkan. Evaluasi Proses dilaksanakan dengan harapan dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana program telah diimplementasikan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dan untuk memperbaiki kualitas program dari program yang berjalan serta memberikan informasi sebagai alat untuk menilai apakah sebuah proyek relatif sukses/gagal (Edison, 2009).
 - *Product evaluation, to serve recycling decision.* Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan? (Tayibnaxis, 1989: 11). Edison (2009) evaluasi produk mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai dan juga untuk menentukan jika strategi yang berkaitan dengan prosedur dan metode yang diterapkan guna mencapai tujuan sebaiknya berhenti, modifikasi atau dilanjutkan dalam bentuk yang seperti sekarang. Evaluasi produk meliputi penentuan dan penilaian dampak umum dan khusus suatu program, mengukur dampak yang

terantisipasi, mengidentifikasi dampak yang tak terantisipasi, memperkirakan kebaikan program serta mengukur efektifitas program. Mbulu (1994/1995: 64) jenis evaluasi produk digunakan untuk: a) menolong keputusan selanjutnya, seberapa besar hasil yang telah dicapai dan apa yang akan dilakukan setelah program dilaksanakan, b) mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model evaluasi untuk mengambil keputusan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan suatu program dengan menggunakan evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk.

b. Model Evaluasi UCLA

Tayibnapis (1989: 11) Alkin (1969) menulis tentang kerangka kerja evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dan memilih beberapa alternatif. Alkin mengemukakan lima macam evaluasi yaitu: .

- *System assessment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem (Tayibnapis. 1989: 11). Mbulu (1994/1995: 83). *System assessment*, berfungsi memberikan informasi mengenai keadaan atau profil program. *Program planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program (Tayibnapis. 1989: 11). *Program implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan? (Tayibnapis. 1989: 11). *Program improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga (Tayibnapis. 1989: 11). Mbulu (1994/1995: 83) *program improvement*, berfungsi memberikan informasi tentang bagaimana program tersebut bermanfaat dan bagaimana program dapat dilaksanakan. *Program certification*, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program (Tayibnapis. 1989: 11).

c. Model evaluasi Brinkerhoff

Model ini dikembangkan oleh Brinkerhoff dan kawan-kawan, dengan mengemukakan tiga jenis desain yaitu (dalam Dwiyo, 2006: 54):

1) *Fixed vs Emergent evaluation design*. Desain *fixed* ditentukan dan direncanakan secara sistematis dan desainnya dikembangkan dengan mengacu pada tujuan program. Rencana analisis dibuat sebelumnya dimana si pemakai akan menerima informasi seperti yang telah ditentukan dalam tujuan. Strategi pengumpulan informasi dalam desain ini menggunakan tes, angket, lembar wawancara. Berbeda dengan desain *fixed*, desain *emergent* dibuat dengan maksud menangkap fenomena yang sedang berlangsung yang berpengaruh terhadap program seperti masukan-masukan baru. Pada prinsipnya desain ini terus berkembang sesuai dengan kondisi dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. 2) *Formatif vs Summative evaluation*. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh data bagi keperluan revisi program, sedangkan evaluasi sumatif dibuat untuk menilai kegunaan suatu program. Pada evaluasi sumatif fokus evaluasi ditujukan pada variabel-variabel yang dipandang penting dan berkaitan dengan kebutuhan pengambilan keputusan. 3) Desain eksperimental dan Quasi eksperimental vs *Natural inquiry*. Desain eksperimental, quasi eksperimental dan *natural inquiry* desain merupakan hasil adopsi dari disiplin penelitian. Desain eksperimental dan quasi eksperimental digunakan untuk menilai suatu program yang baru diujicobakan. Sedangkan *natural inquiry* dilakukan dengan cara evaluator terlibat langsung dengan sumber-sumber informasi serta program yang dilaksanakannya.

d. Model Evaluasi Stake

Model ini dikembangkan oleh Stake (1967), analisis proses evaluasi yang dikemukakannya membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini dan meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi ialah *descriptions* dan *judgement* dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan yaitu: *antecedents (context)*, *transaction (process)*, dan *outcomes (output)* (Tayibnapis. 1989: 11).

Tahap-tahap yang dikemukakan oleh Mbulu (1994/1995: 74-75) meliputi: (1) Tahap pendahuluan (*antecedents*) menyangkut kondisi yang terlebih dahulu ada sampai pada saat dilakukan instruksi yang dihubungkan dengan hasil yang dicapai. (2) Tahap transaksi (*transactions*) menyangkut proses dilakukannya instruksi dan hasil yang diperoleh adalah karena pengaruh dari proses tersebut. (3) Tahap *outcomes* menyangkut hasil yang dicapai setelah program diimplementasikan serta untuk menentukan langkah kerja selanjutnya.

Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake mengatakan bahwa *description* di satu pihak berbeda dengan *judgement* atau menilai. Dalam model ini, *antecedents* (masukan), *transaction* (proses) dan *outcomes* (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut, untuk menilai manfaat program (Tayibnapi,1989:16-17).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Prosedur Penelitian Evaluasi

Penelitian evaluasi adalah salah satu bentuk dari berjenis-jenis penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti. Seperti hal penelitian-penelitian lainnya, penelitian evaluasi juga memiliki prosedur untuk melakukannya. Akan tetapi menurut Suharsimi Arikunto (2007: 298) satu hal yang paling mencolok dalam perbedaan penelitian evaluasi dengan penelitian-penelitian lainnya yaitu untuk mengambil keputusan maka pengambilan kesimpulan penelitian didasarkan atas tolok ukur dan kriteria tertentu. Biasanya yang dijadikan sebagai tolok ukur adalah sasaran yang hendak dicapai melalui program yang dilaksanakan. Tolok ukur untuk komponen-komponen program adalah kualitas maksimal yang dikehendaki bagi setiap komponen. Sedangkan prosedur penelitian evaluasi menurut Suharsimi Arikunto (2007: 299-230) adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengadakan pengkajian terhadap buku-buku, lapangan dan menggali informasi dari para pakar untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti.
2. Peneliti merumuskan problematika penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian setelah terlebih dahulu mengkaji lagi sumber-sumber yang relevan untuk memperoleh ketajaman problematika.
3. Peneliti menyusun proposal penelitian dengan mencantumkan latar belakang masalah, alasan mengadakan penelitian, problematika, tujuan, hipotesis (disertai dengan dukungan teori dan penemuan-penemuan penelitian), metodologi penelitian yang memuat subjek penelitian (populasi dan sampel dengan rincian besarnya sampel, teknik sampling dan siapa sampel penelitiannya), instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Peneliti mengatur perencanaan penelitian, menyusun instrumen, menyiapkan kancan penelitian dan melaksanakan uji coba instrumen.
5. Pelaksanaan penelitian dalam bentuk yang disesuaikan dengan model penelitian yang telah dipilih. Dalam penelitian evaluasi peneliti mungkin mengambil model eksperimen murni (jika persyaratan-persyaratan terpenuhi) atau model eksperimen pura-pura. Dalam hal ini penelitian berfikir bahwa dalam mengevaluasi program dipikirkan mesti ada sesuatu yang

dilaksanakan. Peneliti mengukur tingkat keberhasilan perlakuan yang dilaksanakan dalam program yang dievaluasi. Dalam hal ini peneliti telah mengkaji rencana pengelola program melalui sasaran yang dikehendaki sesudah perlakuan diberikan. Dengan kata lain pelaksana penelitian evaluasi sudah menyiapkan tolok ukur.

6. Peneliti mengumpulkan data dengan instrumen yang telah disusun berdasarkan rincian komponen-komponen yang akan dievaluasi.
7. Menganalisis data yang terkumpul dengan menerapkan tolok ukur yang telah dirumuskan oleh peneliti sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pengelola program.
8. Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan atas gambaran sejauh mana data sesuai dengan tolok ukur.
9. Informasi mengenai hasil penelitian evaluasi disampaikan kepada pengelola program atau pihak yang minta bantuan kepada peneliti evaluasi. Evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi tindak lanjut program yang dievaluasi. Wujud tindak lanjut ada tiga alternatif yaitu:
 1. Program disebarluaskan karena dipandang baik
 2. Program direvisi karena ada hal-hal yang belum sesuai dengan tolok ukur yang dikehendaki
 3. Program dihentikan karena ada bukti bahwa kurang atau tidak baik.

3.2. Desain dan Pendekatan Penelitian

Desain penelitian studi evaluasi ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggunakan data sekunder alih kredit tahun 2013 -2014 yang meliputi data jumlah mahasiswa yang mengajukan alih kredit, asal perguruan tinggi, jumlah sks yang diterima serta data yang menunjang lainnya. Desain studi ini digunakan dengan pengamatan yang cermat untuk melihat gambaran implementasi program kebijakan alih kredit sebagai upaya evaluasi peningkatan kinerja, bukan melihat sebab akibat. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak hanya pengumpulan data, pengukuran data namun sampai dengan analisis dan penjelasan tentang data tersebut.

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan- keterangan maupun publikasi lainnya serta laporan-laporan atau dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumentasi, yaitu

berusaha menghimpun, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber penelitian yang dapat berupa laporan, buku-buku, pedoman dan peraturan pelaksanaan program serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan data-data tentang Program Alih kredit. Data tersebut akan mendukung dan melengkapi analisis data yang didapat dari hasil wawancara maupun dari observasi

Penelitian evaluasi program ini menggunakan pendekatan yang memfokuskan pada proses. Kegiatan evaluasi diharapkan pada sejauh mana pengembangan program dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Keputusan yang diambil adalah perubahan penyempurnaan program.

Model yang akan digunakan pada penelitian ini adalah mengacu pada model Evaluasi Program CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. CIPP merupakan singkatan dari Context, Input, Proses and Product. Dalam penelitian ini memfokuskan pada proses pelaksanaan alih kredit, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Beberapa hal yang akan menjadi kajian dapat dilihat pada Tabel 3. 1 berikut ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian analisis hasil dan pembahasan dibawah ini merujuk pada teori CIPP oleh Stufflebeam yang mengukur pada empat dimensi yaitu Context, Input, Process dan Product dengan masing-masing indikator.

4.1. Konteks (Context)

Mengacu pada pedoman umum Proksi Desa Mapan maka secara kontekstual keberadaan program ini dianggap sesuai untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Sebagai justifikasi terhadap pernyataan diatas paling tidak ada tiga hal yang dapat dijadikan alasan. Pertama, dari hasil pengamatan lapangan ternyata program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat kurang mampu (rawan pangan) masih sangat dibutuhkan. Melihat kondisi masyarakat di sejumlah lokasi program, dengan berbagai keterbatasannya (SDA, SDM dan prasarana penunjang), maka peran Proksi Desa Mapan menjadi sangat strategis. Kedua, dijadikannya rumah tangga miskin sebagai kelompok sasaran peserta program. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat penghasilan dengan ketahanan pangan tingkat rumah tangga (Latief et al, 2000). Ketiga, menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat agar peserta program dapat mengenali potensi dan sumberdaya yang mereka miliki sehingga mampu mengatasi masalah dan menolong dirinya sendiri, agar dihasilkan program yang berkelanjutan (sustainable). Hal ini diperlukan untuk menghindari terulangnya berbagai kasus program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan yang ternyata tidak mampu berjalan secara berkelanjutan karena kurangnya aspek pemberdayaan masyarakat (Irawan dan Romdiati, 2000).

4.2. Masukan (Input)

4.2.1. Acuan Operasional

Sejauh ini acuan resmi yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan program hanya berupa Pedoman Umum yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian selaku

penanggung jawab program di tingkat pusat. Penanggung jawab program di tingkat provinsi yaitu Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan telah membuat Juklak Proksi Desa Mapan tetapi isi dari acuan ini sama dengan Pedum yang disusun oleh pusat. Oleh karena itu maka acuan yang tersedia ini dirasakan sangat tidak mencukupi bagi pihak terkait terutama pelaksana lapangan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya secara baik. Dengan demikian tidak mudah bagi petugas pembina kabupaten, petugas pendamping, aparatur pemerintahan desa dan anggota kelompok afinitas untuk memahami prinsip dan tata cara pelaksanaan program ini secara baik. Hal inilah yang menyebabkan masing-masing pihak tidak memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung pelaksanaan program.

4.2.2. Peserta Program

Sebagian besar peserta program ditentukan melalui DDRT (Data Dasar Rumah Tangga) dan SRT (Survey Rumah Tangga) yang dilaksanakan oleh petugas provinsi, kabupaten dan petugas pendamping. Data dasar penduduk miskin yang umumnya digunakan adalah data penerima BLT. Dengan prosedur ini maka peserta program yang menjadi anggota kelompok afinitas adalah warga desa yang masuk ke dalam kategori miskin. Hanya sebagian kecil saja ditemui adanya penyimpangan terhadap ketentuan ini. Permasalahan yang menonjol dalam penentuan peserta program ini adalah jumlah peserta yang terlalu banyak. Ditemui pada 10 desa (63% dari desa sampel) yang memiliki kelompok afinitas dengan jumlah yang relatif besar yaitu lebih dari 30 KK tanpa adanya prioritas kepada peserta yang paling membutuhkan. Dengan demikian maka pembinaan terhadap peserta program, terutama dalam hal pemberdayaan kelompok, menjadi kurang terfokus.

4.2.3. Petugas Pendamping

Petugas pendamping berperan membantu anggota kelompok afinitas untuk meningkatkan kemampuannya serta menjembatani kepentingan kelompok dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program. Dari 16 desa yang dijadikan sampel ternyata tidak ditemukan satupun petugas pendamping yang secara ideal dapat memenuhi tugas tersebut secara baik. Sejauh ini petugas pendamping hanya terfokus pada kegiatan penyaluran bantuan sosial.

Sementara itu penerapan prinsip dasar pengembangan kelompok afinitas berupa pemberdayaan kelompok, kerjasama melembaga kelompok afinitas dengan pihak terkait serta menggali potensi sumberdaya yang ada belum dilaksanakan secara memadai. Dengan demikian dari aspek kinerja, secara umum pendamping yang ada belum memenuhi sasaran yang diharapkan.

4.2.4. Bantuan Sosial

Bantuan sosial untuk kelompok afinitas diberikan dalam beberapa bentuk sesuai dengan sumber dananya. Bantuan sosial yang berasal dari sumber dana APBD provinsi dan kabupaten diberikan dalam bentuk natura seperti ternak dan saprodi. Dengan pola pemberian bantuan seperti ini maka jenis bantuan yang diberikan umumnya seragam untuk semua peserta. Sedangkan bantuan sosial yang bersumber dari APBN diberikan dalam bentuk hibah senilai Rp 60 – 80 juta per-desa, yang akan ditambah lagi sebesar Rp 20 juta pada tahun 2009. Bantuan ini sesungguhnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta dengan mengacu pada kesepakatan kelompok. Tetapi dalam prakteknya pemanfaatan dana ini cenderung diseragamkan seperti untuk pembelian ternak. Dari empat desa sampel penerima dana tunai yang menjadi peserta program tahun 2006 – 2007 ternyata tiga desa menggunakan dana tersebut secara seragam untuk pembelian ternak dan saprodi ikan keramba. Sedangkan satu desa menggunakan bantuan sosial untuk modal pinjaman usahatani yang dikelola oleh LKD (Lembaga Keuangan Desa).

Sesuai dengan pedoman umum program, keberadaan bantuan sosial bagi peserta program hanyalah sebagai stimulan dalam pengembangan usaha kelompok, sedangkan penggerak utamanya adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri. Fakta di lapangan menunjukkan hal yang sangat berbeda, dimana bantuan sosial merupakan pemicu utama kegiatan kelompok. Ada kesan bahwa keberadaan kelompok afinitas tak lebih dari sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial. Pemahaman serupa juga sangat kuat terlihat pada aparatur pemerintahan desa di sebagian besar lokasi program. Keberadaan program ini diidentikkan dengan bantuan sosial. Oleh karena itu aparatur pemerintahan desa cenderung mengusulkan sebanyak mungkin warganya sebagai peserta program agar bisa mendapatkan bantuan sosial yang lebih besar. Pemahaman terhadap bantuan sosial seperti ini sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan kelompok afinitas. Sebagian besar kegiatan kelompok afinitas kemudian praktis

tidak berjalan tanpa bantuan sosial atau bantuan sosial yang diberikan tidak berhasil dikembangkan.

4.3. Proses (Process)

4.3.1. Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi tentang Proksi Desa Mapan kepada pihak-pihak yang terkait seperti aparat pemerintahan desa dan kecamatan, tokoh masyarakat, TPD, pendamping serta anggota kelompok afinitas telah dilaksanakan oleh pejabat tingkat kabupaten dan provinsi. Hanya saja kegiatan ini belum cukup memadai untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Proksi Desa Mapan secara baik. Dari temuan di desa sampel terlihat bahwa pemahaman aparat pemerintah desa terhadap program ini sangat rendah. Oleh karena itu campur tangan aparat pemerintah desa seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan Proksi Desa Mapan. Begitu juga halnya dengan pemahaman anggota kelompok afinitas terhadap pelaksanaan program ini. Sedikit sekali ditemui anggota kelompok afinitas yang mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam mengikuti program ini sehingga sebagian besar hanya pasrah dan menerima saja segala perlakuan yang diterapkan kepada mereka.

Pemberdayaan kelompok afinitas menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Untuk itu kelompok afinitas harus diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan yang memungkinkan mereka mampu melaksanakan kegiatan tertentu secara bersama. Guna menumbuhkan rasa kesatuan dan kebersamaan ini tentunya membutuhkan tahapan tertentu, mengingat peserta program yang terpilih memiliki latar belakang sosial yang beragam. Dari informasi yang diperoleh di desa sampel tidak ditemui adanya kegiatan yang mendukung penumbuhan kelompok afinitas secara bertahap ini. Praktik yang paling umum dilakukan adalah mengumpulkan peserta yang terpilih, lalu dibentuk kelompok afinitas. Kelompok afinitas inilah kemudian dipersiapkan untuk melengkapi berbagai kebutuhan administrasi yang diperlukan untuk menerima bantuan sosial. Oleh karena itu di sebagian besar kelompok afinitas yang ditemui di desa sampel tidak terlihat adanya ikatan sosial yang kuat antar anggotanya dalam melaksanakan kegiatan pendukung program ini.

Penumbuhan kelompok afinitas ini tentu erat hubungannya dengan aktivitas pendampingan yang

dilaksanakan oleh petugas pendamping. Sejauh ini pendampingan yang dilakukan hanya berorientasi pada pengelolaan bantuan sosial. Sangat kuat kesan di masyarakat bahwa keberadaan kelompok afinitas hanya ditujukan untuk menerima bantuan sosial. Begitu bantuan sosial tidak berhasil dikembangkan maka kelompok afinitas tidak dibutuhkan lagi. Pada kondisi seperti ini tentu sudah sangat sulit bagi petugas pendamping untuk mengajak kembali anggota kelompok afinitas melakukan kegiatan yang mendukung program.

4.3.2. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan

Pengembangan sistem ketahanan pangan mencakup tiga sub sistem yaitu sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Dari 12 desa peserta program sejak tahun 2006 dan 2007, pengembangan sub sistem ketersediaan pangan berupa peningkatan produksi pangan yang masih berjalan hanya ditemui pada dua desa. Kegiatan inipun belum memberikan kontribusi yang berarti karena dilaksanakan dalam jumlah yang sangat terbatas. Sedangkan di desa lainnya pengembangan ketersediaan pangan dilaksanakan secara temporer pada saat disediakan bantuan dari pemerintah. Sebagaimana ditemui bahwa sebagian besar peserta di desa sampel pernah menerima bantuan pemerintah berupa sarana produksi yang bersifat semusim seperti benih padi, sayur-sayuran dan ikan. Begitu bantuan terhenti maka peserta program tetap kembali melakukan aktivitas usaha mereka seperti biasanya. Dengan demikian bantuan seperti ini tidak mendorong peserta program untuk meningkatkan produksi pangan mereka secara berkelanjutan.

Pengembangan sistem distribusi pangan dilaksanakan di sejumlah desa sampel tidak ada kaitan langsung dengan keberadaan peserta program. Sebagai contoh pembangunan jalan produksi pertanian yang dilaksanakan di suatu desa sampel melalui dana PNMP. Pembangunan jalan ini sangat dibutuhkan oleh para petani di wilayah tersebut tetapi bagi warga miskin kegiatan ini tidak banyak manfaatnya karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki lahan. Sementara itu di lokasi lain, pengembangan produksi pangan yang dilaksanakan oleh kelompok afinitas menjadi terhambat karena tidak tersedianya jalan dari lokasi produksi ke pasar terdekat. Terbatasnya pengembangan sistem distribusi ini erat kaitannya dengan lemahnya hubungan kelembagaan antara kelompok afinitas dengan pihak terkait dalam pengambil kebijakan setempat. Dengan demikian proses penetapan prioritas pembangunan infrastruktur penunjang

sistem distribusi pangan menjadi terlepas dari kepentingan peserta program.

Pengembangan sub sistem konsumsi berupa peningkatan pemahaman peserta program tentang gizi keluarga dan pengembangan teknologi pengolahan pangan secara umum belum dilaksanakan. Terhambatnya kegiatan ini erat kaitannya dengan tidak berkembangnya usaha kelompok. Begitu usaha kelompok afinitas tidak berkembang maka tidak mudah lagi bagi petugas pendamping untuk tetap melakukan pembinaan kepada anggota kelompok tersebut, termasuk yang berkaitan dengan upaya peningkatan pemahaman anggota kelompok tentang gizi. Di sejumlah desa kegiatan yang mendukung sub sistem konsumsi ini dilaksanakan oleh pihak terkait seperti penyuluhan gizi oleh PKK tetapi sekali lagi kegiatan ini dilaksanakan tanpa ada kaitannya dengan keberadaan kelompok afinitas.

4.3.3. Pengembangan Kelembagaan

Sejauh ini belum terlihat kinerja yang memuaskan terhadap aspek yang terkait dengan pengembangan kelembagaan pendukung Proksi Desa Mapan. Kelembagaan utama berupa kelompok afinitas yang pernah dibentuk, ternyata pada saat pengamatan sebagian besar tidak berfungsi. Kelompok afinitas umumnya hanya aktif pada awal pembinaan, menjelang penyaluran bantuan sosial. Begitu bantuan telah disalurkan maka selanjutnya peserta program bekerja sendiri-sendiri. Begitu juga halnya dengan TPD yang pernah dibentuk di semua desa sampel tetapi kemudian tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap pelaksanaan program. Ditemui sejumlah desa yang memiliki lembaga pendukung seperti pemerintahan desa, PKK dan lembaga keuangan desa yang relatif baik dalam melakukan kegiatan pengembangan ketahanan pangan di desa tersebut tetapi aktivitas lembaga ini tidak mempunyai kerjasama kelembagaan dengan kelompok afinitas. Keadaan seperti ini tentunya kurang baik untuk peningkatan ketahanan pangan kelompok afinitas, sebagai kelompok masyarakat yang secara komparatif memiliki berbagai kendala dalam mengembangkan dirinya.

4.3.4. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Ditemui di sejumlah lokasi program adanya pembangunan sarana dan prasarana pedesaan seperti jalan desa, jalan usahatani dan irigasi desa. Hanya saja pembangunan sarana dan prasarana ini

tidak ada kaitannya dengan keberadaan kelompok afinitas. Hal ini dikarenakan tidak adanya kerjasama melembaga antara kelompok afinitas dengan lembaga pedesaan lainnya. Apalagi TPD, yang diharapkan berperan sebagai “corong” bagi kelompok afinitas dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan di desa tersebut, secara praktis tidak berfungsi. Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan tidak satupun desa sampel yang memiliki Rencana Pembangunan Desa yang mengakomodasi kepentingan kelompok afinitas. Dengan demikian pembangunan sarana prasarana yang ada tidak banyak membantu peserta program dalam meningkatkan ketahanan pangan mereka.

4.3.5. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangan telah dilaksanakan baik oleh aparat pembina tingkat kabupaten maupun provinsi. Hanya saja efektivitas pemantauan ini dapat dipastikan masih sangat kurang. Hal ini terbukti dari ditemuinya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program yang tidak mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya. Sebagai contoh adanya petugas pendamping di beberapa desa yang tidak aktif melaksanakan tugasnya tanpa adanya tindak lanjut dari instansi penanggung jawab program ini. Salah satu penyebab belum efektifnya kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah terbatasnya acuan yang jelas mengenai pelaksanaan kedua kegiatan ini, yang meliputi objek, pelaksana, waktu dan tindak lanjut. Dengan demikian maka aparat pelaksana di setiap tingkat pengambil keputusan belum memiliki pemahaman yang sama tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini.

Fokus kinerja Proksi Desa Mapan sesungguhnya terlihat dari perkembangan aktivitas kelompok afinitas. Untuk itu harus ada evaluasi terhadap perkembangan setiap anggota kelompok afinitas yang dilaksanakan oleh petugas pendamping. Program ini baru dapat dikatakan berhasil apabila anggota kelompok afinitas mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangganya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya catatan mengenai perkembangan ketahanan pangan setiap anggota kelompok. Ternyata catatan ini tidak ditemui pada semua petugas pendamping yang ada. Hal ini dapat terjadi karena pada hakikatnya sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan Proksi Desa Mapan secara kasat mata memang tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan pendapatan, apalagi ketahanan pangan anggota kelompok afinitas.

4.4. Hasil (Product)

4.4.1. Perkembangan Usaha Produktif

Perkembangan usaha produktif merupakan indikator yang sangat penting dalam pencapaian tujuan Proksi Desa Mapan karena aspek ini sangat terkait dengan peningkatan pendapatan peserta program. Sedangkan peningkatan pendapatan sangat menentukan kemampuan anggota kelompok afinitas dalam memperoleh kebutuhan pangan mereka. Hasil temuan di lokasi sampel ternyata dari 12 desa peserta program sejak tahun 2006 dan 2007 ternyata hanya terdapat dua desa yang masih mengembangkan usaha produktif yang berasal dari bantuan sosial. Dari 10 desa yang bantuan sosialnya tidak berkembang, masih ditemui sejumlah anggota kelompok afinitas yang masih melaksanakan kegiatan usaha produktif dengan memanfaatkan bantuan sosial yang tersisa. Hanya saja jumlahnya sangat tidak signifikan untuk mendorong peningkatan pendapatan keluarga. Dari hasil yang diperoleh ini secara umum dapat disimpulkan bahwa usaha produktif yang mampu dikembangkan oleh anggota kelompok afinitas melalui kegiatan program ini masih sangat minim.

4.4.2. Peningkatan Ketersediaan Pangan

Secara umum peningkatan ketersediaan pangan yang dihasilkan melalui program ini dapat tergambar dari perkembangan bantuan sosial yang dimanfaatkan oleh peserta program untuk budidaya pangan. Selain ditemui di dua desa yang bantuan sosialnya masih dikembangkan untuk usaha produktif sekaligus untuk peningkatan ketersediaan pangan, di sejumlah desa lainnya juga pernah mendapatkan bantuan berupa sarana produksi tanaman pangan seperti padi dan sayur-sayuran. Bantuan ini tentunya memberikan andil terhadap peningkatan ketersediaan pangan peserta program. Hanya saja sifatnya temporer, dimana sarana produksi tersebut digunakan pada musim tanam tertentu saja. Apabila pada musim tanam berikutnya peserta tersebut tidak menerima bantuan sosial lagi maka mereka kembali pada pola usaha sebelumnya atau sama sekali tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ketersediaan pangan dimaksud.

4.4.3. Peningkatan Akses Pangan Rumah Tangga

Akses pangan rumah tangga peserta program di desa sampel sebagian besar dalam keadaan baik. Sejumlah desa berada tidak terlalu jauh dari pusat pemasaran, baik pasar mingguan ataupun harian, sehingga tidak sulit bagi masyarakat setempat untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan. Pada desa – desa seperti ini tentunya akses pangan tidak terlalu menjadi masalah. Akses terhadap pasar yang relatif sulit ditemui di sejumlah lokasi program yang berada di wilayah bagian timur. Lokasi program yang berada di wilayah ini sebagian besar adalah daerah pasang surut yang sarana transportasi utama penduduknya adalah parit (sungai kecil). Parit ini hanya dapat dilalui pada saat air pasang sehingga pada saat surut praktis transportasi menjadi terputus. Oleh karena itu pembangunan jalan desa menjadi kebutuhan yang mendesak. Ternyata kegiatan pembangunan akses jalan di kedua desa ini belum terpenuhi secara memadai sehingga sebagian besar penduduk masih menemui kendala dalam mencapai pasar, terutama untuk memasarkan hasil produksi mereka. Terbatasnya akses ke pusat pemasaran ini sekaligus berpengaruh terhadap minat peserta program untuk mengembangkan usahatani mereka, termasuk usahatani pangan, yang berkaitan dengan penyediaan pangan di desa tersebut.

4.4.4. Perkembangan Pola Konsumsi Pangan

Kinerja peningkatan kesehatan dan status gizi peserta program sangat erat kaitannya keberadaan kelompok afinitas. Dengan terhentinya pengembangan usaha kelompok maka pembinaan kelompok afinitas menjadi terhenti. Hal ini sekaligus menjadikan kegiatan peningkatan kesehatan dan status gizi anggota kelompok seperti melalui penyuluhan gizi juga tidak bisa dilaksanakan. Di sejumlah desa ditemui adanya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan dan status gizi ini oleh Tim Penggerak PKK desa bersangkutan, tetapi kegiatan ini terlepas dari aktivitas pembinaan kelompok afinitas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

- a) Dari aspek konteks Proksi Desa Mapan merupakan program yang sangat sesuai untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga rawan pangan di pedesaan.
- b) Acuan operasional yang mendukung pelaksanaan program hanya berupa Pedoman Umum. Acuan ini dirasakan sangat kurang memadai dalam menunjang operasional program di tingkat lebih bawah, baik di tingkat provinsi, kabupaten / kota maupun di lapangan;
- c) Sebagian besar pemangku kepentingan yang diharapkan terlibat di dalam program ini seperti TPD (Tim Pangan Desa), Petugas Pendamping dan pejabat pemerintahan desa belum berperan secara baik dalam mendukung pelaksanaan program ini;
- d) Sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian sasaran program ini belum tersedia secara memadai. Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk natura umumnya diterima dalam kondisi yang kurang baik. Sedangkan pembangunan prasarana pendukung di lokasi program tidak memiliki kaitan dengan keberadaan peserta program;
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Proksi Desa Mapan telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Hanya saja efektivitas dari kegiatan ini masih relatif rendah.
- f) Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program belum memenuhi sasaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar kegiatan usaha produktif tidak berjalan dengan baik;

5.2. Saran

5.2.1. Kepada instansi penanggung jawab tingkat pusat:

- a) Agar membuat acuan yang lebih rinci mengenai Juklak dan Juknis yang seharusnya disusun oleh penanggung jawab di tingkat yang lebih rendah. Dengan acuan ini diharapkan penanggung program tingkat provinsi dan kabupaten / kota dapat lebih mudah menyusun Juklak dan Juknis yang dibutuhkan. Untuk Juknis yang dianggap sangat penting seperti Acuan

Pemberdayaan Kelompok Afinitas dan Acuan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Petugas Pendamping kiranya dapat langsung disusun oleh pusat;

b) Membuat alat ukur yang dapat digunakan untuk penentuan kinerja suatu desa dalam mencapai suatu tahapan program, tidak hanya didasarkan oleh lama pelaksanaan kegiatan di desa tersebut. Dengan alat ukur ini diharapkan penanggung jawab di daerah dapat lebih mudah melakukan evaluasi terhadap ketercapaian pelaksanaan program di suatu desa;

5.2.2. Kepada instansi penanggung jawab tingkat provinsi:

a) Melakukan rasionalisasi lokasi Proksi Desa Mapan dengan menggunakan kriteria yang lebih akuntabel, bukan atas dasar pemerataan di masing – masing kabupaten / kota. Dengan demikian desa yang ditetapkan sebagai lokasi program memang betul-betul desa yang berpotensi rawan pangan;

b) Melakukan analisis ulang terhadap desa yang sudah ditetapkan sebagai lokasi Proksi Desa Mapan. Bagi desa yang betul-betul dianggap berpotensi rawan pangan tetapi tidak berkembang sebagai Desa Mapan maka desa tersebut hendaknya dapat dibina lebih lanjut secara lebih intensif sebagai lokasi Proksi Desa Mapan. Untuk desa seperti ini kiranya perlu dicarikan bantuan sosial dari berbagai sumber dana yang memungkinkan sehingga anggota kelompok afinitas memiliki kesempatan dalam memperoleh dana penguatan modal guna pengembangan usaha mereka.

c) Menyusun Juklak dan Juknis yang dibutuhkan guna pelaksanaan Proksi Desa Mapan sesuai dengan kondisi dan kebijakan daerah.

5.2.3. Kepada instansi penanggung jawab tingkat kabupaten / kota:

a) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Mapan, terutama yang berkaitan dengan kinerja pendamping dalam mengembangkan kelompok afinitas;

b) Melakukan pembinaan lapangan bagi pihak terkait dalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa di lokasi program. Rencana ini diharapkan menjadi dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan desa, dengan menempatkan

kelompok afinitas sebagai titik sentral;

c) Mengintensifkan kordinasi di tingkat kabupaten / kota terutama dalam menindaklanjuti Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh desa peserta Proksi Desa Mapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S. 2005. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta : Bumi Aksara
- Edison. 2009. *Penelitian dan Evaluasi Dalam Bidang Pendidikan: Evaluasi CIPP*, (Online), (<http://ed150n5.blogspot.com/2009/04/evaluasi-cipp.html>, 11 April 2011)
- Fuddin Van B. 2007. *Evaluasi Program*, (Online), (<http://fuddin.wordpress.com/2007/07/17/evaluasi-program/>, diakses 11 April 2011)
- Inggit Kurniawan. 2009. *Pengertian dan Konsep Evaluasi, Penilaian dan Pengukuran* (Online), (<http://santriw4n.wordpress.com/2009/11/18/pengertian-dan-konsep-evaluasi-penilaian-dan-pengukuran/>, diakses 11 April 2011)
- Lababa, J. 2008. *Evaluasi Program: Sebuah Pengantar*. Diakses pada senin 5 desember 2011 dari <http://evaluasiendidikan.blogspot.com/2008/03/evaluasi-program-sebuah-pengantar.html>.
- McMillan JH dan Schumacer, S. 2010. *Research In Education : Evidence Based Inquiry*. New Jersey : Pearson Education Inc.
- Mbulu, J. 1995. *Evaluasi Program Konsep Dasar, Pendekatan Model, dan Prosedur Pelaksanaan*. Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas.
- Mulyono. 2009. *Penelitian Evaluasi Kebijakan*, (Online), (<http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/13/penelitian-evaluasi-kebijakan/>, diakses 11 April 2011)
- Rika Dwi Kurniasih. 2009. *Teknik Evaluasi Perencanaan*, (Online), (<http://images.rikania09.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SUdfiwokCF8AADuyo-81/Rika%20Eva.doc?nmid=148657139>, diakses 12 April 2011)
- Suharsimi Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sukmadinata, N.S. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Tayipnapis, F.Y. 1989. *Evaluasi Program*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Zulharman. 2007. *Evaluasi Kurikulum : Pengertian, Kepentingan Dan Masalah Yang Dihadapi*, (Online), (<http://zulharman79.wordpress.com/2007/08/04/evaluasi-kurikulum-pengertian-kepentingan-dan-masalah-yang-dihadapi/>, diakses 12 April 2011)

